

Retorika Kuasa Menuju Budaya Resistensi Digital: Krisis Komunikasi Pejabat Indonesia pada Media Massa

<http://dx.doi.org/10.25008/wartaiski.v8i2.362>

Anak Agung Ngurah Bagus Kesuma Yudha^{1*}, Made Vairagya Yogantari²

¹Institut Desain dan Bisnis Bali,

Jl. Tukad Batanghari No.29, Panjer, Denpasar Barat

²Universitas Udayana

Jl. Jend. Sudirman, Dangin Puri Klod, Denpasar Barat

*e-mail korespondensi: yudhayo27@idbbali.ac.id

Submitted: July 5, 2025, **Revised:** December 18, 2025, **Accepted:** December 28, 2025
Terakreditasi SINTA-4 SK Kemristekdikti No. 72/E/KPT/2024 sampai Vol 10(2) tahun 2027

Abstract - Words are meant to serve as bridges, not walls. However, within the current landscape of political communication in Indonesia, public officials' statements often deepen the divide between the ruling power and the people. This study examines how state officials' communication—through unequal and non-empathetic rhetoric—creates dissonance that erodes public trust. Employing a qualitative approach grounded in an interpretive-critical paradigm, this research analyzes ten official statements drawn from national media coverage in 2025, where political communication failed to respond to social realities in a just and humane manner. The theoretical framework employed includes Agenda Setting Theory, Symbolic Domination, and Crisis Communication. Critical discourse analysis is used to uncover hidden layers of meaning embedded in official rhetoric, dissect power relations, and understand the dynamics of social representation constructed within the digital public sphere. The findings reveal that the pattern of politically insensitive communication within Indonesia's current administration, as reflected in digital mass media, accelerates the degradation of governmental legitimacy, amplifies digital resistance, and widens the gap between the state and its citizens. In a world increasingly connected through technology, it is ironically fractured emotionally. This research serves as a reminder that genuine democracy can only flourish in a communicative space that is equal, honest, and empathetic—across both digital and physical platforms of information exchange.

Keywords: political communication; social dissonance; crisis of representation; digital public sphere; civic resistance.

Abstrak - Kata-kata seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok. Namun dalam lanskap komunikasi politik Indonesia hari ini, ujaran para pejabat sering kali membentangi jurang antara kekuasaan dan rakyat. Penelitian ini membedah bagaimana komunikasi pejabat negara, melalui ujaran-ujaran yang timpang dan tidak empatik, menciptakan disonansi yang merusak kepercayaan publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma interpretatif-kritis, penelitian ini menganalisis sepuluh pernyataan pejabat yang diambil dari pemberitaan media nasional dalam tahun 2025, di mana komunikasi politik gagal merespons kenyataan sosial secara adil dan manusiawi. Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Agenda Setting, Dominasi Simbolik dan Komunikasi

Krisis. Metode analisis wacana kritis juga digunakan untuk menggali lapisan makna yang tersembunyi. Metode analisis wacana kritis digunakan untuk menggali lapisan makna yang tersembunyi di balik retorika pejabat, membedah relasi kuasa, serta memahami dinamika representasi sosial yang terbangun dalam ruang publik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pola komunikasi politik yang nir-sensitif pada pemerintahan Indonesia saat ini, yang tercermin melalui media massa digital, mempercepat degradasi legitimasi pemerintah, menguatkan resistensi digital, dan “memperlebar jarak” antara negara dan warganya. Di tengah dunia yang semakin terhubung secara teknologi, namun sayangnya, retak secara emosional. Penelitian ini menjadi pengingat bahwa demokrasi sejati hanya bisa tumbuh dalam ruang percakapan yang setara, jujur dan empatik. Dalam berbagai ruang penyaluran informasi baik secara digital maupun secara nyata.

Kata kunci: komunikasi politik; disonansi sosial; krisis representasi; ruang publik digital; resistensi masyarakat.

PENDAHULUAN

Komunikasi politik memegang peranan strategis sebagai medium negosiasi makna antara aktor politik dan masyarakat di dalam konstelasi demokrasi elektoral di Indonesia. Ruang-ruang diskursif yang sebelumnya dimonopoli oleh para elite, kini dibuka melalui kanal media sosial dan media massa digital. Hal ini menciptakan medan interaksi baru yang penuh dengan kontestasi simbolik. Namun sayangnya, keterbukaan ini tidak serta-merta menciptakan kualitas demokrasi yang lebih baik. Malah sebaliknya, praktik komunikasi politik hari ini kerap mereproduksi bentuk-bentuk dominasi baru yang tersembunyi dalam bahasa populisme, politik identitas, dan manipulasi informasi yang terencana. Makna atau pesan politik berkaitan langsung dengan agenda pengaturan media yang selalu berasal dari pesanan kelompok atau pesanan golongan tertentu (Pureklolon, 2020). Dalam praktiknya, media massa sering kali tidak netral. Melainkan menjadi alat hegemonik yang mereproduksi narasi dominan sesuai dengan arah kepentingan elit politik.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika publik menyadari bahwa lanskap komunikasi politik di Indonesia tidak berdiri dari ruang hampa. Ia berkelindan dengan sejarah otoritarianisme Orde Baru, fragmentasi kelas sosial pasca-reformasi, serta ambiguitas institusi-institusi demokrasi yang belum sepenuhnya mapan. Rentetan peristiwa dalam komunikasi politik pejabat memperjelas situasi ini. Berbagai komentar langsung para pejabat negara dalam merespon situasi yang terjadi di Indonesia mengisyaratkan berbagai banalitas komunikasi yang seharusnya tidak terjadi dari para pemangku kekuasaan kepada masyarakatnya. Respon terhadap kritik menunjukkan gejala cenderung represif dengan cerminan delegitimasi kritik alih alih membuka ruang deliberatif. Kekerasan simbolik tidak kentara, berbahaya, dan tidak kasat mata. Wacana dominan sering kali berfungsi untuk membungkam semua wacana pinggiran atau subaltern lainnya (Thapar-Björkert et al., 2016). Mekanisme ini bekerja melalui legitimasi sosial yang seolah-olah alamiah, padahal sesungguhnya dibentuk oleh relasi kuasa yang historis dan struktural. Komunikasi semacam ini memperlihatkan bahwa bahasa kekuasaan masih beroperasi dalam kerangka relasi yang timpang, di mana yang berbicara memiliki otoritas untuk menentukan makna, sedangkan yang mendengar ditundukkan dalam posisi pasif.

Dengan kata lain, komunikasi politik tidak lagi hanya tentang penyampaian pesan politik, tetapi telah menjadi arena pertarungan ideologis yang sarat dengan nuansa hegemoni. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis bagaimana komunikasi politik bekerja dalam medan kuasa yang tidak seimbang, serta bagaimana publik merespons dan bahkan ikut memproduksi narasi-narasi politik melalui berbagai media massa digital. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak hanya menjadi objek komunikasi, tetapi juga aktor yang aktif memaknai, menolak, atau mengolok-olok bahasa kuasa tersebut. Respon berupa meme, satire, dan ironi digital seringkali menjadi bentuk perlawanan simbolik terhadap komunikasi politik yang dianggap nir-moral dan tidak sensitif.

Komunikasi politik sejatinya tidak berdiri sendiri. Ia berjalan beriringan dengan kualitas demokrasi, efektivitas kebijakan publik, dan legitimasi negara. Kooptasi itu tidak selalu hadir dalam bentuk represi. Justru kooptasi ini sering bersembunyi dalam retorika hukum dan jargon teknokratis yang sulit dibantah oleh warga biasa (Yudha, 2025). Di sinilah ironi demokrasi prosedural bekerja. Seolah sah tapi sebenarnya mengikis makna dasar demokrasi itu sendiri. Ketika komunikasi antara

negara dan rakyat mengalami kegagalan, dampaknya tidak hanya terbatas pada kegaduhan opini publik, melainkan juga bisa berakibat pada melemahnya kepercayaan sosial, rendahnya partisipasi politik, bahkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Seperti yang dikatakan Habermas, komunikasi politik yang sehat adalah yang memungkinkan partisipasi kritis warga dalam ruang publik (Habermas, 1991).

Penelitian ini menjadi penting karena komunikasi politik pejabat Indonesia di masa kini mengalami situasi yang kontradiktif. Terkait dengan penelitian terdahulu yang mengambil sisi komunikasi politik, sebagian besar terfokus pada strategi kampanye, framing media, dan pencitraan politik dalam konteks elektoral. Kajian-kajian terkini justru menunjukkan kecenderungan yang lebih kompleks dan reflektif terhadap fungsi media massa dalam medan komunikasi politik. Beberapa studi (Sampurna et al., 2024; Farid, 2023) menegaskan bahwa media tidak hanya sekadar saluran netral yang menyampaikan pesan politik, tetapi juga bertindak sebagai agen yang membingkai realitas, memoderasi dialog politik, dan bahkan membentuk opini publik secara aktif. Media cetak, misalnya, dinilai tetap memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat karena kredibilitas dan analisis mendalam yang ditawarkannya, meskipun tantangan dari disrupsi digital semakin menguat (Rohmadi, 2023). Dalam ruang demokrasi pasca reformasi, keberadaan media menjadi ruang kontestasi ideologis yang tidak dapat dihindarkan dalam membentuk narasi dominan demi memenangkan persaingan kepentingan politik (Amanu & Letikarmila, 2021). Jurnal lain bahkan menyoroti transformasi peran media sebagai aktor yang berdaya tawar tinggi dalam proses politik, bukan hanya dalam distribusi informasi, tetapi juga dalam menentukan apa yang dianggap penting oleh publik (Dudayef et al., 2024). Dalam konteks ini, media tidak hanya mempengaruhi wacana, melainkan juga perilaku politik masyarakat, termasuk partisipasi, persepsi terhadap legitimasi negara, dan pembentukan preferensi politik yang bersifat jangka panjang (Solihin, 2023). Oleh karena itu, pendekatan terhadap studi komunikasi politik kini tidak lagi cukup jika hanya terfokus pada dimensi teknis kampanye. Perlu memperhatikan dimensi simbolik, struktural, dan ideologis dari praktik komunikasi itu sendiri, terutama ketika dilembagakan dalam ruang media yang sarat kepentingan dan kuasa.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengisi celah tersebut dengan memfokuskan kajian pada praktik komunikasi politik pejabat di Indonesia selama periode awal tahun 2025 yang terangkum pada media massa digital, khususnya dalam konteks krisis, polemik kebijakan, dan dinamika sosial dalam ranah komunikasi publik. Penelitian ini mendasarkan pada pertanyaan utama: bagaimana bentuk komunikasi politik pejabat yang bermasalah di Indonesia, dan apa dampaknya terhadap persepsi, kepercayaan, serta respons masyarakat terhadap kebijakan negara? Maka, penelitian ini mengajukan pertanyaan kunci diantaranya bagaimana bentuk komunikasi politik pejabat yang bermasalah di Indonesia, dan apa dampaknya terhadap persepsi, kepercayaan, serta respons masyarakat terhadap negara? Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa komunikasi politik bukan sekadar urusan gaya bicara atau strategi pencitraan, tetapi menyangkut persoalan fundamental tentang bagaimana kekuasaan berbicara kepada warganya, dan bagaimana warga menilai kebermaknaan negara dalam hidup mereka sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai pentingnya membangun komunikasi politik yang lebih manusiawi, adil, dan berpihak pada keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teori utama: (1) Agenda-Setting McCombs dan produksi isu publik, (2) Dominasi Simbolik dalam perspektif Pierre Bourdieu, dan (3) Komunikasi Krisis dari W. Timothy Coombs. Ketiganya dipilih karena secara bersama-sama membentuk sebuah bingkai analitis yang memungkinkan penelitian ini untuk membaca komunikasi politik pejabat bukan hanya sebagai aktivitas retorik, tetapi juga sebagai praktik kuasa yang berdampak pada legitimasi negara dan kualitas demokrasi.

Teori Agenda-Setting

Teori agenda-setting menjelaskan bagaimana media menentukan isu apa yang perlu dipikirkan publik, bukan apa yang harus diutamakan. Dalam konteks pejabat negara, persoalan muncul ketika media menjadikan pernyataan pejabat sebagai sumber utama. Menjadikan mereka tidak hanya

pembuat kebijakan tetapi juga penentu narasi publik. McCombs (2005) menegaskan bahwa mekanisme ini bekerja melalui penonjolan dan pengabaian isu. Pernyataan pejabat yang viral seringkali tidak berdiri sendiri. Media memperkuat visibilitasnya hingga publik menyerap atau menolaknya dengan emosi kolektif. Akibatnya, publik tidak hanya diarahkan untuk membahas isu tertentu, tetapi juga menerima kerangka tafsir yang ditawarkan negara.

Teori Dominasi Simbolik

Pierre Bourdieu melalui *Language and Symbolic Power* melihat komunikasi sebagai tindakan simbolik yang berakar pada struktur sosial. Setiap ujaran membawa bobot kekuasaan (*symbolic capital*) sesuai posisi sosial pembicara. Ucapan pejabat negara, karena itu, tidak pernah netral. Selalu mengandung klaim atas kebenaran dan moralitas publik. Dominasi simbolik terjadi ketika bahasa digunakan untuk meneguhkan hierarki sosial tanpa kekerasan fisik.

Teori Komunikasi Krisis

W. Timothy Coombs menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi krisis ditentukan oleh tiga hal: kecepatan informasi, empati, dan kejelasan tanggung jawab. Tanpa itu, krisis justru membesar. Dalam banyak kasus di Indonesia, pejabat kerap gagap menunjukkan empati. Respons yang defensif dan elitis memperburuk situasi karena publik menilai bukan hanya isi pesan, tapi juga ketulusan emosinya. Dalam pandangan Coombs, komunikasi krisis adalah ujian moral dan bukan hanya soal reputasi. Melainkan soal tanggung jawab dan kepekaan terhadap penderitaan publik.

Kerangka Konseptual: Komunikasi Politik sebagai Praktik Kuasa

Gabungan ketiga teori tersebut menempatkan komunikasi politik pejabat sebagai praktik sosial yang berakar pada logika kuasa. Ia bukan sekadar strategi pencitraan, melainkan arena di mana makna diproduksi, diperebutkan dan dikontrol. Bukan hanya dari isi pesannya tetapi juga dari siapa yang berhak berbicara. Melalui kerangka ini, penelitian berupaya melampaui pendekatan normatif dan menawarkan pembacaan struktural, historis, serta kritis terhadap bagaimana komunikasi pejabat merefleksikan relasi kuasa negara dalam wacana publik digital.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Untuk memahami bagaimana ujaran pejabat publik membentuk relasi kuasa dalam lanskap komunikasi politik Indonesia, diperlukan pendekatan metodologis yang mampu menangkap kompleksitas makna di balik bahasa. Pernyataan resmi bukanlah sekadar respons administratif, melainkan representasi dari struktur ideologis yang bekerja melalui simbol dan narasi. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan dan metode dalam penelitian ini disusun secara kritis untuk menangkap dimensi-dimensi diskursif, institusional, dan kultural dari komunikasi politik kontemporer. Bagian berikut menjelaskan pendekatan teoritis dan metodologis yang digunakan untuk menganalisis praktik komunikasi para pejabat negara dalam konteks krisis kepercayaan publik dan disonansi sosial.

Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa pernyataan pejabat negara bukan sekadar barisan kata yang dilontarkan di ruang publik. Ia adalah bagian dari lanskap komunikasi kekuasaan. Sebuah arena simbolik tempat makna dibentuk, diperebutkan, dan seringkali diselewengkan. Tiga teori digunakan sebagai pisau analisis utama: teori agenda-setting dari McCombs dan Shaw, kerangka *language and symbolic power* dari Pierre Bourdieu, dan teori komunikasi krisis dari W. Timothy Coombs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis yang berpijak pada epistemologi interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap relasi antara bahasa, kekuasaan, dan respons publik dalam konteks komunikasi politik pejabat negara di Indonesia. Dalam hal ini, pernyataan pejabat tidak dibaca sebagai teks netral, melainkan sebagai praktik diskursif yang mengandung relasi ideologi, posisi kuasa, dan reproduksi struktur sosial.

Penggunaan konsep wacana kritis (*Critical Discourse Analysis / CDA*) sebagai pisau analisis memungkinkan peneliti mengurai bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk representasi tertentu tentang masyarakat, oposisi, maupun krisis (Flowerdew & Richardson, 2018) menekankan bahwa praktik bahasa dalam ruang publik tidak pernah bebas nilai, tetapi selalu dimediasi oleh kepentingan ideologis dan institusional. Oleh karena itu, metodologi ini juga membuka ruang untuk

mengkritisi bentuk-bentuk komunikasi politik yang problematis, misalnya pernyataan pejabat yang mereduksi kompleksitas persoalan sosial melalui lelucon, sinisme, atau penyederhanaan yang menyakiti publik.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data utama dalam penelitian ini bersumber dari berita daring yang memuat pernyataan kontroversial pejabat negara dalam rentang waktu 2025 saat integritas krisis dan sentimen publik terhadap pejabat negara menguat secara digital. Sebanyak sepuluh pernyataan dianalisis, yang masing-masing mengandung kutipan langsung dari pejabat terkait. Data ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi digital, dengan kriteria seleksi yang meliputi: (1) pernyataan berasal dari pejabat publik aktif; (2) telah dipublikasikan oleh media arus utama nasional; dan (3) memicu respons publik signifikan (baik berupa kritik, diskusi, atau viralitas digital).

Teknik analisis yang digunakan meliputi (1) Analisis Teks: menganalisis struktur linguistik pernyataan pilihan kata, metafora, hingga struktur kalimat digunakan dalam pernyataan; (2) Interpretasi Praktik Diskursif: membaca bagaimana teks tersebut diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi oleh media serta publik dan (3) Eksplanasi Praktik Sosial: memahami bagaimana teks berkontribusi dalam mereproduksi (atau menantang) struktur sosial dan relasi kuasa. Setiap kasus dianalisis, kemudian dikaji secara komparatif untuk menemukan pola diskursif yang berulang misalnya, gaya komunikasi sinis, humor agresif, atau penyederhanaan isu. Setelah itu, ditemukan bahwa mayoritas pernyataan mengandung bentuk *symbolic violence* yakni kekerasan simbolik yang disampaikan melalui bahasa dan dibungkus sebagai kewajaran oleh posisi kuasa yang dipegang.

HASIL PENELITIAN

Produksi Isu dan Agenda Setting

Dalam lanskap digital kontemporer, pernyataan pejabat yang viral bukan sekadar menjadi kutipan namun telah menjadi agenda. Komentar Presiden Prabowo mengenai fluktuasi harga cabai di Indonesia pada satu waktu membuahkan pernyataan yang tidak kalah mengejutkan. "Jangan terlalu banyak makan terlalu pedas". Hal ini menjadi contoh bagaimana media menyusun narasi secara selektif yang kemudian memicu reaksi publik luas (Trikarinaputri & Fika, 2025).



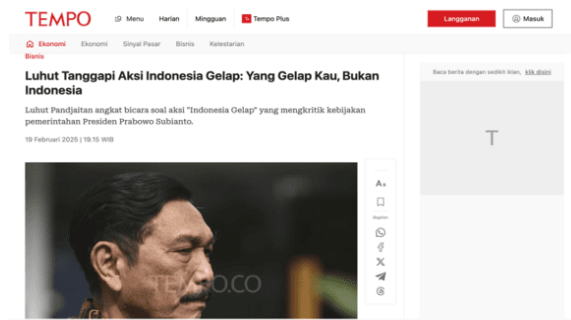
Gambar 1. Headline berita Tempo tanggal 23 Maret 2025
Sumber : Tempo.co

Dalam konteks krisis ekonomi domestik, apa yang mungkin dimaksudkan sebagai seloroh ringan, justru terbaca oleh banyak kalangan sebagai bukti lemahnya empati elite terhadap kegelisahan struktural yang dialami rakyat. Pernyataan ini membuka pola pemikiran yang menjauhkan kebijakan negara dari logika keseharian masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Meroketnya harga **cabai** rawit di pasaran belakangan ini mendapat tanggapan dari **Presiden Prabowo** Subianto dan sejumlah menteri terkait. Kepala Negara menyarankan masyarakat mengurangi konsumsi makanan pedas sementara waktu.

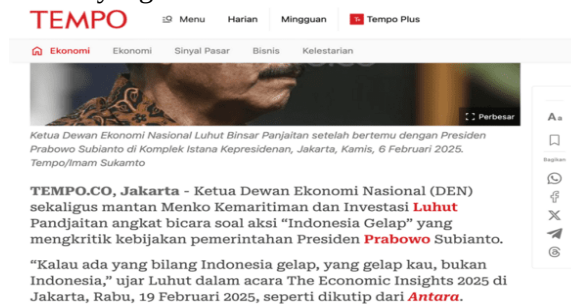
"Mungkin harga **cabai rawit** naik beberapa saat lalu, sekarang sudah mulai turun. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali, sekarang dokter melarang saya makan terlalu pedas. Yang muda-muda silakan," kata dia dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait persiapan jelang Idulfitri, Jumat, 21 Maret 2025.

Gambar 2. Teras berita Tempo tanggal 23 Maret 2025
Sumber : Tempo.co



Gambar 3. Headline berita Tempo tanggal 19 Februari 2025
Sumber : Tempo.co

Respon pejabat negara terhadap ekspresi kolektif publik sering kali membuka tabir tentang bagaimana kuasa memahami kritik. Pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dalam forum The Economic Insight 2025 "Yang gelap kau, bukan Indonesia" adalah salah satu contoh paling gamblang (Redaksi, 2025b). Ucapan itu dilontarkan sebagai respons terhadap gerakan "Indonesia Gelap". Sebuah bentuk kekecewaan publik yang terakumulasi dan terwujud dalam aksi-aksi demonstrasi di berbagai kota. Alih-alih dibaca sebagai sinyal kedaruratan moral atau ketidakpuasan yang layak didengar, gerakan tersebut justru dibalas dengan frasa yang cenderung mengedepankan penyangkalan simbolik. Di balik kalimat singkat itu, terpantul cara pandang kekuasaan yang menolak melihat kegelapan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Pernyataan ini bukan hanya menggambarkan jarak simbolik antara negara dan warganya, tetapi juga mempertegas bagaimana kritik kerap direduksi menjadi persoalan persepsi individual dan bukan sebagai panggilan untuk meninjau ulang arah kebijakan. Pernyataan yang mencuat di saat pergerakan mahasiswa dan masyarakat dalam "Indonesia Gelap" direspon berbeda dengan pemahaman yang ada di akar rumput (publik) dengan gaya komunikasi yang sinis.



Gambar 4. Teras berita Tempo tanggal 19 Februari 2025
Sumber : Tempo.co



Gambar 5. Headline berita CNN Indonesia tanggal 22 Maret 2025
Sumber : Cnnindonesia.com

Dalam konteks wacana publik yang kian terfragmentasi, pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, tak luput dari sorotan. Dirinya menyebut kekalahan Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan sebagai akibat dari ketimpangan asupan gizi, seolah kondisi fisiologis para pemain menjadi akar masalah yang patut disorot (Agt, 2025). Namun alih-alih memperkuat argumentasi, pernyataan ini justru memantik gelombang kritik, mengingat sebagian besar skuad Timnas saat itu dihuni oleh pemain naturalisasi yang notabene tumbuh dalam sistem gizi negara asal yang memadai. Publik pun bereaksi bukan semata karena substansi, melainkan karena disonansi logika yang terasa menyederhanakan kompleksitas. Pernyataan tersebut, yang muncul berdekatan dengan program "Makan Bergizi Gratis" yang sedang digempur kritik, seolah menjadi upaya pengalihan wacana dari masalah struktural yang lebih dalam: pembinaan olahraga yang lemah, tata kelola yang semrawut, hingga minimnya infrastruktur pendukung. Hal ini memperlihatkan narasi personal dapat membelokkan perhatian publik dari masalah yang lebih sistematis.



Gambar 6. Teras berita CNN Indonesia tanggal 22 Maret 2025
Sumber : Cnnindonesia.com

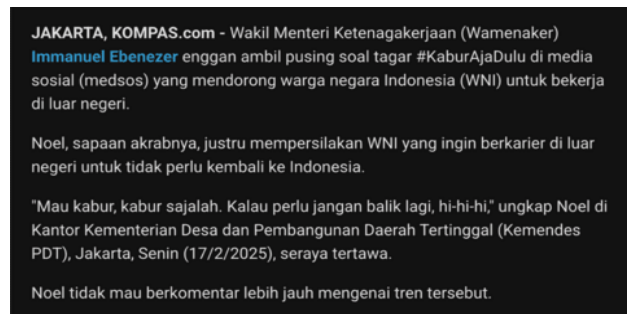
Dominasi Simbolik Melalui Bahasa

Setiap pernyataan pejabat tidak bisa dipisahkan dari posisi kuasa yang mereka wakili. Bahasa merupakan instrumen dominasi yang tidak selalu berbentuk larangan eksplisit. Bukan dengan ancaman yang dimunculkan secara terang-terangan tapi melalui legitimasi makna yang terasa halus namun mampu mengatur secara kompleks. Hal ini terwakilkan pada pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang merespon tingginya gerakan masyarakat agar keluar dari Indonesia untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik dalam hashtag #Kaburajadulu dengan kalimat “Kabur sajalah, kalau perlu jangan balik lagi” (Aditya, 2025).



Gambar 7. Headline berita Kompas tanggal 17 Februari 2025
Sumber : Kompas.com

Ucapan ini bekerja dalam dua arah dominasi. Pertama, secara simbolik mengecilkan problem sistemik ketenagakerjaan yang dihadapi generasi muda. Yang bergulat dengan pengangguran, upah rendah, dan ketidakpastian kerja melalui keputusan politis yang terasa meresahkan. Hal-hal utama yang terasa minor dalam pandangan para pejabat publik maupun penyelenggara negara.



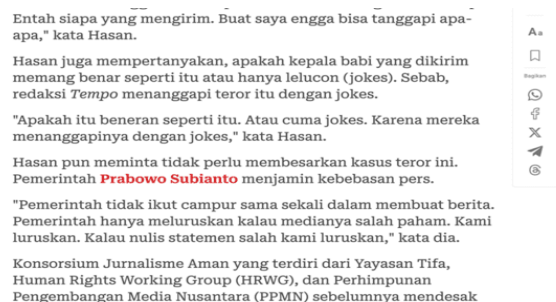
Gambar 8. Teras berita Kompas tanggal 17 Februari 2025
Sumber : Kompas.com

Kedua, menciptakan jarak psikologis antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang merasa tidak punya pilihan selain berpikir untuk "kabur" dari negara sendiri. Ditambah dalam sebuah pernyataan tegas secara individu bahwa dirinya tidak memberikan atensi lebih pada fenomena #kaburajadulu. Pernyataan Immanuel Ebenezer secara individu akan selalu bersinggungan dengan jabatan yang melekat pada dirinya sebagai pejabat negara. Wamenaker sebagai perpanjangan tangan negara tidak memberikan perhatian pada kisruh pergerakan masyarakat #kaburajadulu. Lebih dalam, ini menjadi persoalan bagaimana negara memposisikan warganya sebagai objek yang harus ditertibkan, bukan sebagai subjek yang layak diajak berdialog.



Gambar 9. Headline berita Tempo tanggal 21 Maret 2025
Sumber : Tempo.co

Dalam ruang demokrasi yang seyogyanya dijaga dengan kehati-hatian, kiriman kepala babi ke redaksi Tempo pada tahun 2025 bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Ini merupakan pesan simbolik yang kasar, vulgar, dan sarat muatan intimidasi dengan bentuk tekanan psikologis yang diarahkan pada lembaga pers. Namun yang justru membuat peristiwa ini mengguncang bukan hanya aksinya, melainkan bagaimana negara meresponsnya. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Kepresidenan, menanggapi ancaman tersebut dengan pernyataan yang kini nyaris menjadi kutipan abadi: "Sudah, dimasak saja " (Yaputra, 2025). Kalimat itu dilontarkan dalam nada bercanda, seolah kepala babi yang dikirim ke kantor media dapat direduksi menjadi bahan lelucon ringan. Dengan menjadikan ancaman sebagai objek tawa, kekuasaan mengambil alih penafsiran publik, yang seharusnya dipahami sebagai bentuk represi terhadap kebebasan pers justru diredam menjadi urusan perut atau olok-olok semata.



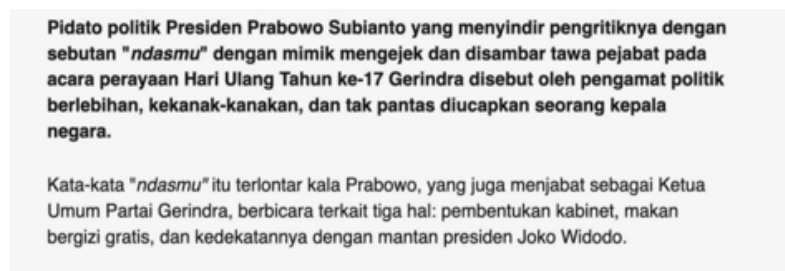
Gambar 10. Isi berita Tempo tanggal 21 Maret 2025
Sumber : Tempo.co

Respon “Sudah, dimasak saja” dari Hasan Nasbi bukan sekadar lelucon sarkastik. Ini menjadi cerminan bagaimana kuasa sering kali memilih meredam luka dengan olok-olok. Alih-alih memberi ruang bagi solidaritas dan sikap moral yang tegas terhadap kekerasan simbolik, respons itu justru mencerminkan sikap negara yang membiarkan kekhawatiran akan keselamatan jurnalis yang terombang-ambing tanpa perlindungan.



Gambar 11. Headline berita BBC News tanggal 18 Februari 2025
Sumber : Bbc.com

Pilihan kata dari seorang figur pejabat terlebih Presiden membawa makna simbolis yang kuat. Mengucapkan “*ndasmu*” secara implisit menegaskan relasi hierarkis. Kritikus diposisikan sebagai “berani mengkritik” dan direndahkan dengan ujaran ini. Reaksi yang muncul saat publik merespon berbagai kebijakan diantaranya program makan bergizi gratis, kabinet yang gemuk dan isu cawe-cawe dalam pemerintahan membuahkan sebuah frasa yang terasa tidak elok terlebih jika ditujukan bagi masyarakat yang mengungkapkan pandangannya (Redaksi, 2025a). Pendekatan demikian kontras dengan semangat dialog demokratis di mana diskusi terbuka seharusnya didasari penghargaan timbal balik.



Gambar 12. Teras berita BBC News tanggal 18 Februari 2025
Sumber : Bbc.com

Dengan menganggap kritik publik sebagai hal berbahaya atau bertentangan, hal ini memperlihatkan model kepemimpinan top-down yang paternalistik. Dalam konteks demokrasi, presiden idealnya mendorong komunikasi dua arah. Mendengarkan keluhan rakyat dan menjelaskan kebijakan dengan sopan. Secara sosiopolitik, ledakan retorika kata kasar presiden menunjukkan dinamika politik Indonesia yang terkadang berpolemik personal. Bahasa kasar yang terlontar oleh otoritas tertinggi justru menjadi sarana penegasan hierarki simbolik. Mereduksi perbedaan pendapat menjadi konflik simbolik, dan justru mengingatkan bahwa kekuasaan dapat memanifestasikan dirinya lewat ujaran kasar.

Komunikasi Krisis Nir-Empati

W. Timothy Coombs menyebut bahwa komunikasi krisis yang sehat sebaiknya memuat tiga elemen: pengakuan, empati, dan pemulihan kepercayaan. Dari sepuluh berita yang dianalisis, tidak

satu pun menunjukkan praktik komunikasi krisis yang utuh. Sebagian besar pernyataan yang dilontarkan pejabat justru memperkeruh keadaan dengan mereduksi atau bahkan mengalihkan substansi masalah.



Gambar 13. Headline berita CNN Indonesia tanggal 24 Maret 2025
Sumber : Cnnindonesia.com

Pernyataan Wakil Menteri Agama yang menyebut permintaan THR oleh ormas sebagai “Budaya Lebaran sejak dulu” (Rzr & Gil, 2025) terdengar seperti upaya meredakan riak. Namun justru mengaburkan batas antara tradisi dan tekanan. Dalam konteks komunikasi publik, ini bukan sekadar nostalgia, melainkan pemingkiaan krisis dengan cara yang melemahkan bobot etisnya. Sebuah pola yang oleh Coombs disebut sebagai *diminish strategy*. Alih-alih memperjelas posisi negara dalam melindungi warga dari praktik yang rentan disalahgunakan, narasi ini malah membiarkan ruang abu-abu tumbuh di antara publik.

Belakangan ini ramai kabar ormas membuat resah karena meminta uang THR kepada para pengusaha di berbagai wilayah di Jabodetabek. Salah satunya datang dari Depok. Polisi tengah menyelidiki sebuah edaran permintaan uang THR dari tiga ormas kepada pengusaha di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Surat edaran oleh tiga ormas itu turut beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut, ketiga ormas itu meminta THR dengan dalih *social control* keamanan menjelang Lebaran.

"Sejumlah pemilik usaha di Sawangan mengaku resah setelah menerima tiga surat dari organisasi masyarakat (ormas) yang meminta dana keamanan Hari Raya Idulfitri," demikian keterangan dalam unggahan yang beredar.

Gambar 14. Isi berita CNN Indonesia tanggal 24 Maret 2025
Sumber : Cnnindonesia.com

Saat keresahan di masyarakat tumbuh karena mendapatkan surat untuk memberikan THR dengan sejumlah nilai pada berbagai ormas sebagai dalih menerapkan social control keamanan saat lebaran, rasa aman yang diharapkan pada negara terasa seperti pembiaran aih alih hal yang biasa terjadi. Ketika relasi kuasa dibungkus dengan dalih budaya, maka yang lahir bukan keakraban. Ini melahirkan normalisasi atas tekanan yang tak kasat mata.



Gambar 15. Headline berita Republika tanggal 12 Maret 2025
Sumber : News.republika.co.id

Pernyataan Jenderal Maruli Simanjuntak yang melabeli publik yang menyiratkan makna kembalinya dwifungsi Abri dalam pengesahan UU TNI maupun jabatan sipil yang bisa dimasuki perwira aktif dilabeli dengan kata “Otak kampung” (Putra, 2025). Pernyataan ini tidak sekadar menyiratkan kemarahan institusional, melainkan menunjukkan bagaimana militer merespons krisis dengan pendekatan vertikal, mengukuhkan jarak simbolik antara negara dan warganya. Pola defensive bolstering terjadi yang di mana otoritas cenderung menegaskan legitimasi internal dengan merendahkan pihak luar.

“Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampung menurut saya,” ujar Maruli geram dengan pihak tertentu yang berperilaku terbang pilih dalam menyerang institusi TNI AD.

Dia merasa heran, para aktivis dan pengamat tidak bising ketika ada instansi lain menguasai pemerintahan. “Ini orang waktu ada salah satu institusi masuk ke semua kementerian, *nggak* ribut gitu loh. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah, ini perlu media-media tanggap seperti itu. Apakah agen asing kah atau apa?” ujar Maruli mempertanyakan.

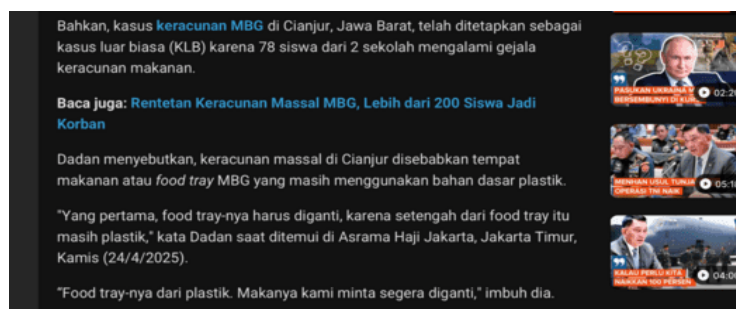
Gambar 16. Isi berita Republika tanggal 12 Maret 2025
Sumber : News.republika.co.id

Lebih jauh, ketika Maruli menyebut bahwa publik “diam saja” saat lembaga lain masuk ke semua kementerian, dan mempertanyakan apakah mereka adalah agen asing, publik melihat gejala klasik dari whataboutism. Logika pembandingan yang menyesatkan untuk membenarkan posisi diri sendiri.



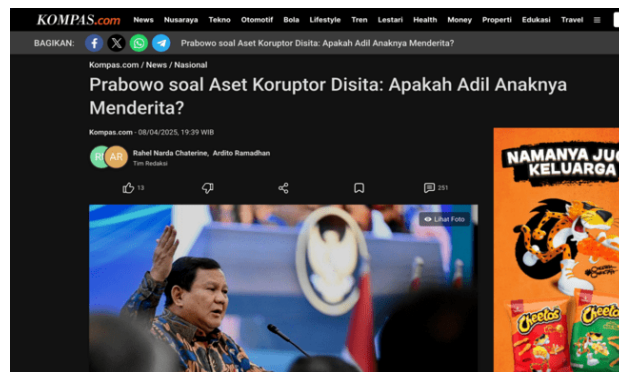
Gambar 17. Headline berita Kompas tanggal 25 April 2025
Sumber : Kompas.com

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut “Kasus kejadian secara kuantitatif masih 0,5 persen kasus keracunan” (Safitri, 2025) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdengar sederhana. Sejatinya menyimpan beban yang jauh lebih kompleks. Angka itu, yang secara teknokratis mungkin dianggap kecil, menjadi semacam selimut naratif yang berusaha menutupi kenyataan di lapangan. Bahwasanya masih ada anak-anak yang harus merasakan sakit akibat makanan yang seharusnya memberi mereka gizi, bukan trauma. Hal ini merupakan pembingkai kejadian buruk sebagai insiden minor. Ketimbang secara jujur mengakui bahwa sistem pengawasan dan distribusi belum bekerja sebagaimana mestinya.



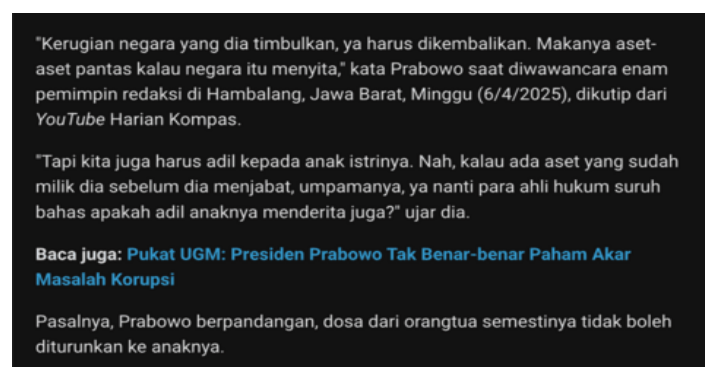
Gambar 18. Isi berita Kompas tanggal 25 April 2025
Sumber : Kompas.com

Lebih jauh, yang menyakitkan dari ucapan itu bukan hanya dari isi statistiknya, namun dari cara menyampaikannya. Sebagai pembenaran yang menggeser perhatian dari krisis kepercayaan menjadi sekadar masalah teknis. Seolah-olah, selama tidak mencapai satu persen, maka luka itu bisa ditoleransi. Dalam ingatan kolektif yang mulai goyah terhadap jaminan negara, komentar seperti ini justru menambah jurang antara kebijakan dan kemanusiaan. Dalam kejadian yang terjadi secara masif dan menasar penerus bangsa, sensitivitas menjadi kunci. Tentang bagaimana menyikapi dan memperbaiki sistem yang perlu dioptimalkan dibandingkan memberi pernyataan yang tercetus dalam angka dengan presentase yang diglorifikasi.



Gambar 19. Headline berita Kompas tanggal 8 April 2025
Sumber : Kompas.com

Pernyataan Presiden Prabowo yang menggugat keadilan penyitaan aset koruptor dengan bertanya, “Apakah adil anaknya menderita?” (Chaterine, 2025) merupakan pergeseran wacana dari kejahatan struktural yang menjadi narasi sentimental untuk meluruhkan fokus serta mengandung resonansi yang jauh melampaui statistik atau hukum positif. Ungkapan ini mencerminkan strategi diminishment, yaitu upaya melemahkan persepsi publik terhadap beratnya suatu krisis dengan menekan sisi-sisi emosional yang dianggap tidak secara langsung terlibat. Namun di balik retorika itu, muncul kegelisahan yang lebih dalam. Bahwa negara berisiko kehilangan posisi etikanya ketika empati diarahkan bukan pada publik yang menjadi korban korupsi, melainkan pada keluarga pelaku yang diandaikan sebagai korban baru dari sistem keadilan.



Gambar 20. Teras berita Kompas tanggal 8 April 2025
Sumber : Kompas.com

Alih-alih menghadirkan kepemimpinan yang tegas dan empatik terhadap korban sesungguhnya, yaitu rakyat, pernyataan ini mengalihkan simpati pada keluarga pelaku. Memperhalus wajah kekuasaan sambil mempertajam jarak antara elite dan publik. Menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, bahasa bisa menjadi alat untuk mengaburkan tanggung jawab. Dalam dunia simbolik kekuasaan, kata-kata tak pernah netral. Kata-kata mengandung arah, mengisyaratkan siapa yang

dilindungi dan siapa yang dilupakan. Dalam kesepuluh pernyataan pejabat tersebut, empati nyaris absen. Yang hadir adalah ketidaksabaran terhadap kritik, keinginan cepat meredakan opini, dan pengalihan wacana. Padahal, publik sejatinya tidak hanya membutuhkan informasi, namun juga pengakuan bahwa negara hadir dan mampu memahami luka-luka sosial yang sedang terjadi. Serta harapan untuk memperbaiki secara struktural berbagai kelemahan dalam berbagai keputusan yang terlanjur dibuat oleh negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menelusuri denyut komunikasi politik pejabat negara di tengah lanskap digital Indonesia yang semakin gaduh. Dari sepuluh pernyataan yang ditelaah, menjadi terang bahwasanya ujaran pejabat bukanlah sekadar bentuk ekspresi individual, melainkan bagian dari lanskap simbolik yang kompleks. Hal yang berdiri di antara negara, media, dan warga saling berebut makna. Bahasa dan pernyataan yang diucapkan pejabat negara menjadi representasi kekuasaan itu sendiri. Dalam situasi politik yang penuh polarisasi, bahasa dan pernyataan dari para pejabat negara seyogyanya menjadi jembatan dialog. Bukan menjadi alat seleksi atas siapa yang layak didengar, dan siapa yang cukup diam. Temuan penelitian ini tidak bisa disikapi dengan netralitas apatis. Komunikasi pejabat publik masih terasa terlalu elitis. Nir-empati dan terlalu minim refleksi. Dalam bingkai agenda-setting, terlihat jelas bagaimana media turut mengafirmasi narasi kekuasaan dengan membingkai isu secara strategis bukan substantif.

Melalui kacamata Bourdieu, bahasa negara tampak bekerja untuk mengokohkan hierarki simbolik. Bukannya membuka ruang partisipasi. Sementara teori komunikasi krisis memperlihatkan satu kegagalan mendasar. Alih-alih menyembuhkan, bahasa pejabat sering justru menegaskan jarak dan menorehkan luka. Ini bukan sekadar krisis komunikasi. Ini telah menjadi krisis etik yang memperlihatkan bahwa sebagian pejabat negara belum menjadikan warganya sebagai subjek yang layak didengar namun sayangnya hanya sebagai kerumunan publik yang harus diyakinkan. Bahasa politik Indonesia seringkali menjelma menjadi ruang pertunjukan kekuasaan. Di mana yang berbicara tidak sedang berdialog namun memastikan bahwa ia menjadi pusat makna (Yudha, 2025).

Dalam ruang sempit seperti ini, satire, meme, dan ironi digital yang lahir dari masyarakat bukan menjadi sekadar hiburan. Ini menjadi semacam pertentangan epistemik. Seperti dicatat oleh (Yudha, 2020) ruang media di dunia digital kemudian menjadi ruang baru bagi masyarakat, yang sebelumnya cenderung diam dan menahan diri dalam ruang publik, untuk kemudian berani menyuarakan gagasan dan memperlihatkan perlawanan. Suara publik hadir untuk menunjukkan bahwa narasi kekuasaan tidak melulu mutlak. Maka menjadi tugas akademisi untuk tidak hanya mencatat dan menganalisis, tapi juga menegaskan, bahwa bahasa kekuasaan yang menentang kepentingan publik sebaiknya diperbaiki dan percakapan publik harus dikembalikan kepada rakyat. Karena demokrasi tidak tumbuh dari keheningan yang dipaksakan, melainkan dari keberanian untuk menyuarakan sesuatu yang tidak nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. R. (2025, February 17). Soal #KaburAjaDulu, Wamenaker: Kabur Sajalah, kalau Perlu Jangan Balik Lagi. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/02/17/13051151/Soal-Kaburajadulu-Wamenaker-Kabur-Sajalah-Kalau-Perlu-Jangan-Balik-Lagi>.
- Agt. (2025, March 22). Kepala BGN: PSSI Susah Menang Karena Gizinya Tak Bagus. <https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20250322152027-92-1211902/Kepala-Bgn-Pssi-Susah-Menang-Karena-Gizinya-Tak-Bagus>.
- Amanu, H., & Letikarmila. (2021). Peran Media Massa Dalam Komunikasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Balayudha*, 1(1), 1–8.
- Bourdieu, P. (2001). *Language and Symbolic Power* (J. B. Thompson, Ed.). Harvard University Press. (Reprint of the 1991 edition).
- Chaterine, R. N. (2025, April 8). Prabowo soal Aset Koruptor Disita: Apakah Adil Anaknya Menderita? <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/04/08/19390751/Prabowo-Soal-Aset-Koruptor-Disita-Apakah-Adil-Anaknya-Menderita>.
- Coombs, W. T. (2007). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding* (2nd ed.). Sage Publications.

- Couldry, N. (2004). Theorising Media as Practice. *Social Semiotics*, 14(2), 115–132.
- Dudayef, F., Gumelar, R. G., & Kurniawati, N. K. (2024). Posisi Strategis Media Massa dan Perannya dalam Proses Komunikasi Politik. *Zarathustra : Jurnal Sosiologi Dan Filsafat*, 2(1), 158–168.
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (Revised edition). Routledge.
- Farid, A. S. (2023). Peran Media Massa Dalam Memoderasi Dialog Politik. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 151–161.
- Flanagan, J. C. (1954). The Critical Incident Technique. *Psychological Bulletin*, 51(4), 327–358.
- Flowerdew, J., & Richardson, J. E. (2018). *The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies*. Routledge.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*. NYU Press.
- McCombs, M. (2005). A Look at Agenda-setting: past, present and future. *Journalism Studies*, 6(4), 543–557.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Pureklolon, T. (2020). Komunikasi Politik: Kajian Substansial dalam Pendekatan Politik. In *Jurnal Visi Komunikasi* (Vol. 19, Issue 02, pp. 205–222).
- Putra, E. P. (2025, March 13). TNI AD Diserang, KSAD Geram: Otak Kampung, Agen Asing Kah? <https://News.Republika.Co.Id/Berita/St0xm6484/Tni-Ad-Diserang-Ksad-Geram-Otak-Kampung-Agen-Asing-Kah-Part2>.
- Redaksi. (2025a, February 18). Presiden Prabowo sebut “ndasmu” terhadap pengritiknya – “Kritik terbuka seolah-olah musuh.” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy0p075wxpwo>.
- Redaksi. (2025b, February 19). Luhut Tanggapi Aksi Indonesia Gelap: Yang Gelap Kau, Bukan Indonesia. <https://www.tempo.co/ekonomi/luhut-tanggapi-aksi-indonesia-gelap-yang-gelap-kau-bukan-indonesia-1209409>.
- Rohmadi, M. (2023). Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam Judul Berita Politik Pilkada pada Media Cetak dalam Perspektif Pragmatik. *Jurnal Sastra Indonesia*, 12(1), 22–30.
- Rzr, & Gil. (2025, March 24). Wamenag Tak Persoalkan Ormas Minta THR: Itu Budaya Lebaran Sejak Dulu. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250324155029-32-1212473/wamenag-tak-persoalkan-ormas-minta-thr-itu-budaya-lebaran-sejak-dulu>.
- Safitri, K. (2025, April 25). Bos BGN Sebut MBG Terus Dievaluasi, Kasus Keracunan Masih Ada 0,5 Persen. <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/25/08565131/bos-bgn-sebut-mbg-terus-dievaluasi-kasus-keracunan-masih-ada-05-persen>.
- Sampurna, A., Rahmi, N. U., Aftariza, D., & Pandiangan, H. A. (2024). Implementasi Media Massa Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Humaniora Revolusioner*, 8(6), 67–70.
- Solihin, O. (2023). Media Massa dalam Proses Politik. *Unikom*.
- Thapar-Björkert, S., Samelius, L., & Sanghera, G. S. (2016). Exploring symbolic violence in the everyday: misrecognition, condescension, consent and complicity. *Feminist Review*, 112(1), 144–162. <https://doi.org/10.1057/fr.2015.53>
- Trikarinaputri, E., & Fika, D. R. (2025, March 23). Harga Cabai Meroket, Saran Presiden Prabowo: Jangan Terlalu Banyak Makan Terlalu Pedas. <https://www.tempo.co/ekonomi/harga-cabai-meroket-saran-presiden-prabowo-jangan-terlalu-banyak-makan-terlalu-pedas-1223171>.
- Yaputra, H. (2025, March 21). Hasan Nasbi Soal Teror Kepala Babi ke Redaksi Tempo: Dimasak Saja. <https://www.tempo.co/politik/hasan-nasbi-soal-teror-kepala-babi-ke-redaksi-tempo-dimasak-saja-1222732>.
- Yudha, A. A. N. B. K. (2025). Dekonstruksi Budaya Politik Indonesia. *Tinta Emas Perkasa*.
- Yudha, A. A. N. B. K. (2020). The Discourse Of Resistance Of Balinese Peoples Through Status Writing In Social Media At The Moment Of Pandemic Covid19. *Architecture & Design (IMaDe)*, 1, 354–361. <https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/imade>